

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh kemunculan penyakit baru yang dikenal dengan nama virus corona, yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* atau biasa disebut COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, sebuah kota di Tiongkok. *World Health Organizations* (WHO) kemudian menetapkan wabah ini sebagai pandemi global karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat internasional. Wabah tersebut awalnya diketahui berasal dari sebuah pasar yang menjual berbagai jenis daging hewan. Diduga, virus ini berasal dari salah satu hewan yang dijual di sana dan menulari beberapa orang yang berada di pasar tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, virus ini ternyata telah menyebar ke berbagai negara. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat. Hanya dalam hitungan bulan, hingga Oktober 2020, virus ini telah menyebar ke lebih dari 200 negara. WHO menganggap pandemi ini berbahaya karena jumlah kasus yang sangat tinggi dan angka kematian yang cukup besar. Tercatat pada Oktober 2020, terdapat sekitar 37 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia dengan angka kematian mencapai 1 juta jiwa. Sampai dengan tanggal 9 September 2021, tercatat sebanyak 222.406.582 kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi, dengan jumlah kematian akibat penyakit tersebut mencapai 4.592.934 jiwa secara global (Fitri, 2020). COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) (Dai, 2020).

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terdeteksi di Jakarta pada 14 Februari 2020, menyerang seorang perempuan berusia 31 tahun beserta ibunya yang berusia 64 tahun. Namun, menurut Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, diduga virus ini telah mulai menyebar sejak minggu ketiga Januari 2020. Dugaan ini didasarkan pada laporan mengenai Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien

Dalam Pengawasan (PDP) (Erna, 2022). Sejak kasus pertama ditemukan, penyebaran COVID-19 terus meluas ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah kematian yang tercatat telah melebihi satu juta jiwa. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 25 Maret 2021, terdapat 1.482.559 kasus terkonfirmasi, dengan 1.317.119 pasien dinyatakan sembuh dan 40.081 orang meninggal dunia (Kemkes.go.id).

Virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, dengan gejala awal yang umumnya menyerupai influenza ringan dan dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan berat seperti *pneumonia*. Penularan virus ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, di antaranya adalah inhalasi droplet atau percikan air liur dari individu yang terinfeksi, khususnya saat bersin atau batuk. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi melalui kontak tidak langsung, seperti menyentuh area mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan setelah memegang permukaan benda yang telah terkontaminasi virus dari penderita COVID-19 (Kinanda & Alfa, 2021). Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam upaya menekan laju penyebaran virus, berbagai kebijakan penanganan dan pencegahan diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara. Kendati demikian, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Indonesia, bersama dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ekonomi yang relatif maju, turut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan akibat situasi tersebut (Yasyintha, 2023).

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat telah mengambil berbagai langkah untuk menangani pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain penerapan *social distancing*, *lockdown* di daerah-daerah yang terdampak, tes PCR secara massal, serta kebijakan terbaru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Langkah-langkah tersebut diambil untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang

bisa membahayakan keselamatan masyarakat dan stabilitas negara (Aldian Hidayat et al., 2022). Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan industri kesehatan untuk mengembangkan vaksin dalam negeri bernama Vaksin Merah Putih, yang mulai dikembangkan sejak pertengahan tahun 2020. Namun dalam prosesnya, pengembangan vaksin ini menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas penelitian, waktu, perubahan struktur kelembagaan, hingga masalah pada virus dan subjek penelitian. Hambatan-hambatan ini membuat proses pengembangan vaksin nasional menjadi lebih lambat.

Dalam kajian hubungan internasional, terdapat pandangan utama yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan elemen penting bagi suatu negara dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan negara lain. Kepentingan nasional juga menjadi dasar dalam memperkuat kekuatan suatu negara serta memperluas pengaruhnya di kancah global. Setiap negara dapat membentuk dan memperkuat posisinya melalui kepentingan ini. Salah satu contoh bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia adalah dengan Tiongkok, yaitu melalui diplomasi vaksin oleh Tiongkok sebagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia (Erna, 2022).

Diplomasi vaksin menjadi salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang dapat memberikan jalan bagi Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan vaksin. Diplomasi kesehatan global dapat diartikan sebagai suatu proses di mana tercipta kompromi dan kesepakatan dalam pembentukan aliansi baru, khususnya di sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah kerja sama dalam penyediaan vaksin, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok ketika menawarkan vaksinnya kepada Indonesia (Harizqi, 2022).

Diplomasi adalah seni dan praktik negosiasi yang biasanya dilakukan oleh individu yang mewakili suatu negara atau organisasi. Unsur utama dalam diplomasi adalah negosiasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara. Oleh karena itu, melalui kerjasama antar negara, tujuan utamanya adalah untuk mencapai

kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak (Yasyintha, 2023).

Tiongkok sebagai salah satu negara produsen vaksin terbesar, menjadi mitra strategis dalam diplomasi vaksin di Indonesia. Vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Tiongkok menjadi vaksin pertama yang digunakan secara luas dalam program vaksinasi nasional. Kerja sama ini tidak hanya merepresentasikan hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia dalam bidang kesehatan, tetapi juga mencerminkan penggunaan instrumen diplomasi sebagai alat untuk menjamin kepentingan nasional dalam situasi krisis (Huang, 2021).

Dalam konteks pelaksanaan di tingkat subnasional, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan tantangan kompleks dalam mendistribusikan dan mengimplementasikan program vaksinasi. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat memiliki beban berat dalam upaya percepatan cakupan vaksinasi, terutama pada tahap awal ketika ketersediaan vaksin sangat terbatas dan jenis vaksin yang digunakan didominasi oleh vaksin Sinovac. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjalankan kebijakan pusat secara efektif dengan memperhatikan karakteristik demografis, geografis, serta dinamika sosial masyarakat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021).

Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi tidak terlepas dari berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur distribusi, resistensi masyarakat terhadap vaksin asing, dan persepsi publik terkait efektivitas vaksin buatan Tiongkok. Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi antara kebijakan luar negeri yang bersifat makro dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah yang bersifat mikro. Dengan kata lain, keberhasilan diplomasi vaksin ditentukan tidak hanya oleh capaian negosiasi antarnegara, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan teknis di daerah.

Pada tahun 2020, sebagai tahun awal masuknya pandemi COVID 19 ke Indonesia, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus

terkonfirmasi positif tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan monitoring kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang juga diperoleh melalui dokumentasi dan publikasi resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 90.216 kasus terkonfirmasi positif di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 74.920 kasus dinyatakan sembuh, dan sebanyak 1.446 kasus berakhir dengan kematian. Data ini menunjukkan tingkat penyebaran yang tinggi dan tekanan besar terhadap sistem pelayanan kesehatan di Jawa Barat sejak fase awal pandemi.

Kondisi ini menggambarkan pentingnya penanganan pandemi secara cepat dan masif di Jawa Barat, termasuk melalui program vaksinasi. Dengan latar belakang tersebut, masuknya vaksin asal Tiongkok dari diplomasi vaksin ke Indonesia menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan pandemi. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai bentuk diplomasi vaksin, memanfaatkan dukungan Tiongkok dalam bentuk pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan distribusi nasional, termasuk untuk wilayah Jawa Barat. Karena provinsi ini memiliki beban kasus yang tinggi dan populasi yang sangat besar, pelaksanaan vaksinasi menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, analisis terhadap diplomasi vaksin Tiongkok di Indonesia menjadi relevan untuk melihat bagaimana strategi tersebut diterapkan secara nyata di lapangan, salah satunya melalui studi kasus di Provinsi Jawa Barat yang data pelaksanaannya dapat ditelusuri melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Melihat fenomena di atas, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor kesehatan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tingginya angka infeksi sebelum program vaksinasi menyebabkan tenaga kesehatan kewalahan dalam menangani lonjakan pasien, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kematian pasien dengan gejala berat dan kritis. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran vaksin dalam menekan angka penularan, mengurangi tingkat keparahan gejala, serta melindungi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi.

Diplomasi vaksin antara Tiongkok dan Indonesia berperan penting dalam penyediaan vaksin Sinovac yang menjadi salah satu vaksin utama dalam program vaksinasi nasional. Sebagai negara berkembang dengan keterbatasan dalam produksi vaksin sendiri, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memastikan ketersediaan vaksin yang cukup bagi masyarakat. Dengan adanya diplomasi vaksin ini, Indonesia berhasil mengamankan jutaan dosis vaksin dari Tiongkok untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan implementasi diplomasi vaksin Tiongkok oleh Pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap upaya penanggulangan pandemi di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai hubungan antara diplomasi kesehatan dan kebijakan publik, serta menjadi bahan evaluatif bagi perumusan strategi kesehatan luar negeri yang lebih adaptif dan responsif terhadap krisis di masa mendatang serta dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana diplomasi vaksin berkontribusi terhadap sistem kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan pandemi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi di masa depan serta dalam menjalin kerja sama internasional dalam bidang kesehatan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Bagaimana Diplomasi Vaksin Tiongkok di Indonesia dalam Menanggulangi COVID-19 di Jawa Barat?".

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini berjudul “Diplomasi Vaksin Tiongkok di Indonesia Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat)”. Untuk menjaga fokus dan kejelasan penelitian, serta menghindari cakupan yang terlalu luas, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Diplomasi Vaksin
 - a) Penelitian ini hanya membahas diplomasi vaksin antara Tiongkok dan Indonesia, khususnya dalam konteks pengadaan vaksin Sinovac melalui kerja sama bilateral.
 - b) Studi ini tidak akan membahas kerja sama vaksin Indonesia dengan negara lain di luar Tiongkok atau program vaksinasi yang berasal dari organisasi internasional seperti *COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)*.
2. Cakupan Wilayah dan Studi Kasus
 - a) Fokus studi kasus berada pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini dipilih karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta menjadi prioritas dalam distribusi vaksin Sinovac pada masa awal vaksinasi nasional.
 - b) Penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan dampak dari hasil diplomasi vaksin Tiongkok di tingkat provinsi.
 - c) Studi ini tidak membahas implementasi vaksinasi di provinsi lain yang mungkin memiliki dinamika berbeda dalam penanganan pandemi.
3. Periode Waktu
 - a) Penelitian ini membatasi periode waktu analisis pada masa awal pandemi COVID-19 hingga pasca-implementasi vaksinasi Sinovac, yaitu dari Maret 2020 hingga Desember 2022.
 - b) Data yang dianalisis, baik kualitatif maupun kuantitatif, dikumpulkan dan ditinjau berdasarkan periode tersebut, dan tidak mencakup perkembangan vaksinasi setelah tahun 2022.

1. 4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui diplomasi vaksin Tiongkok.
2. Untuk mengetahui pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui diplomasi vaksin Tiongkok dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Teoritis:

1. Menambah wawasan dalam studi hubungan internasional, khususnya pada topik diplomasi kesehatan (*health diplomacy*) di masa pandemi.
2. Memperkaya literatur akademik tentang pengaruh diplomasi bilateral dalam situasi darurat kesehatan global.

b) Manfaat Praktis:

1. Memberikan panduan kepada pembuat kebijakan terkait peningkatan kualitas implementasi diplomasi vaksin di daerah.
2. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi efektivitas penanganan pandemi COVID-19.

c) Manfaat Sosial:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi diplomasi internasional dalam penanggulangan pandemi.
2. Memberikan manfaat langsung bagi layanan kesehatan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas penanganan vaksinasi.

d) Manfaat Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Memberikan data empiris mengenai pengaruh pelaksanaan vaksinasi hasil diplomasi vaksin terhadap penurunan tingkat infeksi, tingkat keparahan kasus, serta tingkat kematian di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan internal di Jawa Barat terkait kesiapan menghadapi krisis kesehatan serupa di masa mendatang.

e) Manfaat bagi Akademisi dan Peneliti Lain:

1. Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang serupa, baik yang terkait dengan diplomasi vaksin, studi di Jawa Barat, maupun strategi penanganan pandemi.
2. Sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1 *Health Security*

Konsep keamanan kesehatan pertama kali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1994 dengan tujuan utama untuk melindungi individu dari ancaman penyakit serta pola hidup yang tidak sehat. Keamanan kesehatan memastikan bahwa layanan kesehatan

dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, tanpa adanya diskriminasi. Konsep *Health Security* digunakan untuk menganalisis ancaman COVID-19, yang mencerminkan kondisi kesehatan bebas dari wabah menular. Menurut UNDP, ancaman terhadap keamanan kesehatan mencakup konflik, pelanggaran HAM, kemiskinan, penyakit menular, dan kerusakan lingkungan. Pandemi COVID19 menunjukkan bagaimana penyebaran virus yang cepat dan mobilitas global menciptakan ancaman serius, menjadikan isu kesehatan prioritas utama yang memerlukan kerja sama lintas individu, kelompok, negara, dan komunitas internasional (*United Nations Development Programme* (UNDP), 1994).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keamanan kesehatan mencakup serangkaian tindakan proaktif dan reaktif yang dirancang untuk meminimalkan dampak kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat secara global. Untuk memperkuat sistem ini, pada tahun 2005 didirikan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR), yang berfungsi sebagai instrumen hukum guna mengatur respons yang cepat dan efektif terhadap wabah serta keadaan darurat kesehatan lintas negara. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, suatu negara dapat memanfaatkan kolaborasi yang telah terjalin dalam merancang serta menerapkan kebijakan keamanan kesehatan yang lebih sistematis. Dalam perspektif yang lebih luas, Ottersen menjelaskan bahwa konsep keamanan kesehatan juga dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus yang secara eksklusif menangani isu-isu terkait keamanan kesehatan (Dewi, et al, 2022).

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, aspek kesehatan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan hidup manusia serta pembangunan suatu negara. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, diperlukan pendekatan kolaboratif dan lintas disiplin di berbagai level, mulai dari lokal, regional, nasional, hingga internasional. Dengan

demikian, keamanan kesehatan berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional suatu negara. Dalam praktiknya, konsep ini mencakup berbagai langkah strategis dalam merespons keadaan darurat atau ancaman kesehatan masyarakat, seperti kebijakan *lockdown*, pembatasan sosial (*physical distancing*), serta sistem kerja jarak jauh (*work from home*) (Simon, 2011).

Keamanan kesehatan dapat diwujudkan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi medis yang membantu dalam pencegahan serta penanggulangan penyakit. Selain itu, inovasi di bidang kesehatan juga berperan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Perencanaan organisasi kesehatan menjadi aspek penting dalam menghadapi krisis epidemi, sementara upaya untuk mengurangi kerentanan di sektor pertanian juga turut berkontribusi terhadap ketahanan kesehatan. Selain itu, peran militer dan intelijen dalam strategi pertahanan, keterlibatan media dalam menyebarkan informasi kepada pembuat kebijakan dan masyarakat, serta penerapan prinsip etika dan hukum dalam menangani isu-isu kesehatan, semuanya merupakan bagian integral dari sistem keamanan kesehatan yang komprehensif.

Pada awalnya pemerintah menganggap bahwa isu tersebut sebagai golongan biasa. Namun pada akhirnya pandemi Covid-19 telah berubah menjadi ancaman bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan pandemi ini harus ditangani dengan baik melalui praktek dari pendekatan sekuritisasi yaitu sebuah upaya ataupun kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani permasalahan (Wahyudiono & Al-Farauqi, 2021).

Dapat dilihat bahwa dengan adanya krisis pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia selain mengancam kesehatan, mengancam pula kesejahteraan masyarakat, kehidupan manusia serta keamanan manusia. Virus ini menyebabkan kematian dan jumlah dari penderita akibat terpapar oleh virus Corona tidak sedikit. Di Indonesia per 1 April 2020,

jumlah pasien yang terpapar oleh virus atau positif sebanyak 1.528 kasus dan 136 meninggal dunia (Yashitya, 2023).

Alasan penulis menggunakan teori ini karena penulis melihat dalam konteks diplomasi vaksin Tiongkok di Indonesia, kedua negara menjadikan vaksin sebagai alat diplomasi untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Tiongkok menggunakan vaksin sebagai cara untuk memperbaiki citra negaranya di dunia internasional yang buruk setelah kemunculan pertama kasus Covid-19 di Tiongkok. Bagi Tiongkok, citra negara sangat penting karena berkaitan dengan eksistensi suatu negara. Oleh karena itu, memperbaiki citra negaranya juga akan berdampak pada hegemoni Tiongkok di dunia internasional.

Bagi Indonesia sendiri, vaksin digunakan untuk memperbaiki kesehatan dan juga perekonomian di Indonesia. Mengingat Covid-19 berdampak besar bagi semua sektor, vaksinasi diperlukan untuk memulihkan kesehatan dan sektor lainnya dan diplomasi vaksin ini sangat membantu Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

1.5.2 Diplomasi Vaksin

Diplomasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memengaruhi keputusan serta perilaku masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lainnya tanpa melibatkan kekerasan atau peperangan. Diplomasi juga mencakup aspek politik luar negeri, proses negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi, serta keterampilan dalam menjalankan hubungan internasional. Dalam lingkup yang lebih sempit, diplomasi biasanya dilakukan melalui konsultasi aktif dan perjanjian yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri atau perwakilan diplomatik seperti kedutaan. Sementara itu, dalam cakupan yang lebih luas, diplomasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk membangun hubungan antarnegara (Pradipto, et al, 2024).

Menurut *Kickbusch, Silberschmidt, dan Buss*, diplomasi kesehatan global bertujuan untuk menangkap proses negosiasi yang melibatkan berbagai level dan pemangku kepentingan guna membentuk serta mengelola kebijakan kesehatan global. Namun, konsep lain dari diplomasi kesehatan tidak hanya menitikberatkan pada negosiasi, tetapi juga berfokus pada peningkatan kesehatan dalam kerangka kepentingan nasional suatu negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan diplomasi kesehatan sebagai disiplin ilmu yang berkembang dalam berbagai bidang, seperti kesehatan masyarakat, hubungan internasional, manajemen, hukum, dan ekonomi. Diplomasi ini menekankan negosiasi yang memengaruhi kebijakan kesehatan global (Shapiro, 2014).

Prinsip utama diplomasi kesehatan melibatkan kerja sama antarnegara untuk mengatasi permasalahan kesehatan (Koplan JP, 2009). Dalam diplomasi modern, diplomasi kesehatan semakin luas cakupannya dan mulai digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi ekonomi, politik, dan militer. Diplomasi kesehatan memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat serta memperkuat hubungan antarbangsa. Selain itu, diplomasi kesehatan mencakup tiga isu utama, pertama, pandemi dapat melintasi batas negara, kedua, kerja sama global diperlukan untuk mengatasi pandemi dan ketiga, setiap negara harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, terutama dalam hal vaksinasi, yang sering kali memicu kebijakan nasionalis terkait distribusi vaksin (Adams V, 2008).

Diplomasi kesehatan memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai elemen *soft power* dan alat membangun citra negara. Kedua, sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Ketiga, sebagai sarana yang dapat memengaruhi hubungan luar negeri suatu negara. Pada awalnya, diplomasi kesehatan berfokus pada kerja sama internasional guna melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit menular. Dengan demikian, diplomasi kesehatan mengintegrasikan prioritas kesehatan global

dengan kebijakan luar negeri yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan kesehatan, memperbaiki hubungan internasional, serta mendorong komitmen bersama untuk bekerja sama dalam isu-isu kesehatan global (Asoke, 2022).

Diplomasi kesehatan juga menjadi kajian multidisipliner yang menggabungkan kesehatan masyarakat, hubungan internasional, manajemen, hukum, dan ekonomi. Negosiasi dalam diplomasi kesehatan bertujuan untuk membentuk serta mengelola kebijakan kesehatan global yang lebih efektif. Isu kesehatan kini menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri, di mana strategi yang lebih kuat diperlukan dalam agenda internasional untuk memastikan akses kesehatan yang adil dan merata (Oslo Ministerial Declaration, 2007).

Diplomasi vaksin merupakan bagian dari diplomasi kesehatan yang mulai berkembang sejak tahun 2001, beriringan dengan diplomasi sains. Diplomasi vaksin mencakup berbagai aspek diplomasi kesehatan yang berfokus pada penggunaan serta distribusi vaksin. Selain melibatkan negara-negara, diplomasi vaksin juga melibatkan organisasi internasional seperti GAVI, WHO, dan berbagai lembaga lainnya. Diplomasi ini memiliki peran penting sebagai bentuk intervensi kemanusiaan dalam proses vaksinasi, sekaligus menjadi instrumen diplomasi yang baru berkembang. Tidak hanya untuk kepentingan nasional, diplomasi vaksin juga bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan secara global (Pradipto, 2024).

Dalam konteks diplomasi kesehatan global, diplomasi vaksin dapat diartikan sebagai strategi yang bergantung pada pengiriman serta penggunaan vaksin sebagai alat diplomasi. Diplomasi ini juga mengusung prinsip keterbukaan dan transparansi dengan tujuan mempromosikan vaksin agar dapat digunakan secara luas dalam kebijakan kesehatan global maupun

kebijakan luar negeri masing-masing negara. Proses diplomasi vaksin mencakup penelitian, pengembangan, produksi, serta distribusi vaksin dalam kerangka diplomasi kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan vaksin bagi seluruh masyarakat dunia (PJ Hotez, 2014).

Kurangnya kerangka kerja yang transparan dalam interaksi diplomatik antarnegara di tingkat global sering kali menjadi hambatan dalam respons terhadap wabah penyakit. Oleh karena itu, diplomasi vaksin menjadi konsep yang lahir dari diplomasi kesehatan global dengan fokus pada pemanfaatan dan distribusi vaksin untuk menangani krisis kesehatan. Lebih jauh lagi, diplomasi vaksin juga merupakan bagian dari diplomasi sains, yang menggabungkan aspek ilmiah dengan kebijakan kesehatan global (Liangtao, et al, 2022).

Dalam konteks diplomasi vaksin antara Indonesia dan Tiongkok, kedua negara menggunakan vaksin sebagai alat diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional mereka masing-masing. Tiongkok memanfaatkan vaksin sebagai cara untuk memperbaiki citranya di dunia internasional, terutama setelah kasus Covid-19 pertama kali muncul di negaranya. Citra yang baik di tingkat global sangat penting bagi Tiongkok karena berhubungan langsung dengan pengaruh dan eksistensinya di dunia internasional. Oleh karena itu, melalui diplomasi vaksin, Tiongkok berupaya memperbaiki reputasinya serta memperkuat hegemoninya di tingkat global (Pradipto, et al, 2024).

Bagi Indonesia, diplomasi vaksin berperan penting dalam menangani pandemi dengan meningkatkan aspek kesehatan masyarakat serta memulihkan sektor ekonomi. Covid-19 memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, sehingga vaksinasi menjadi langkah krusial untuk

pemulihan. Diplomasi vaksin yang dijalankan selama pandemi sangat membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi.

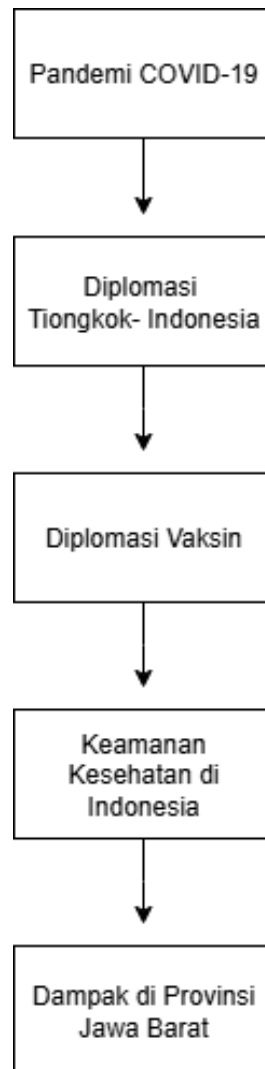
Oleh karena itu teori diplomasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana diplomasi vaksin antara Indonesia dan Tiongkok berlangsung, termasuk mekanisme perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara dalam kerja sama vaksinasi selama pandemi Covid-19.

1.6 Asumsi / Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan oleh penulis adalah:

“Diplomasi vaksin Tiongkok di Indonesia memainkan peran strategis dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya dalam penyediaan dan distribusi vaksin di Provinsi Jawa Barat. Diplomasi vaksin tidak hanya ditujukan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap vaksin, tetapi juga menjadi representasi dari hubungan bilateral yang erat antara Tiongkok dan Indonesia dalam sektor kesehatan. Efektivitas implementasi diplomasi vaksin di tingkat daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kesiapan fasilitas layanan kesehatan, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin, terutama vaksin yang berasal dari luar negeri seperti Sinovac. Dengan adanya vaksinasi yang didukung melalui diplomasi vaksin Tiongkok ini, terdapat dampak positif yang signifikan terhadap pengendalian pandemi di Jawa Barat, seperti penurunan angka infeksi, menurunnya kebutuhan perawatan intensif, serta berkurangnya angka kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana diplomasi vaksin Tiongkok berkontribusi terhadap penanganan pandemi di Provinsi Jawa Barat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan kesehatan publik di tingkat daerah.”

1.7 Kerangka Analisis



Gambar 1.1 Kerangka Analisis

Kerangka analisis pada gambar diatas menggambarkan bagaimana berbagai faktor yang berkaitan dengan diplomasi vaksin Tiongkok di Indonesia mempengaruhi keamanan kesehatan nasional serta dampaknya di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah penjelasan dari setiap elemen dalam kerangka analisis:

- Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini. Penyebaran virus yang cepat menyebabkan krisis kesehatan global, termasuk di Indonesia, yang mengharuskan negara mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani pandemi, salah satunya melalui diplomasi vaksin.

- Diplomasi Vaksin Tiongkok di Indonesia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menjadi faktor penting dalam implementasi diplomasi vaksin. Tiongkok, sebagai salah satu negara produsen vaksin utama, menawarkan kerja sama dengan Indonesia dalam bentuk pengadaan vaksin, transfer teknologi, dan bantuan kesehatan lainnya. Diplomasi ini mencerminkan kepentingan kedua negara dalam memperkuat hubungan internasional melalui sektor kesehatan.

- Diplomasi Vaksin

Diplomasi vaksin merupakan bagian dari diplomasi kesehatan yang menekankan pada kerja sama antarnegara dalam penyediaan dan distribusi vaksin. Melalui diplomasi vaksin Tiongkok, Indonesia berhasil mendapatkan akses vaksin dalam jumlah besar, yang kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

- Keamanan Kesehatan di Indonesia

Keamanan kesehatan mengacu pada upaya pemerintah dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat. Diplomasi vaksin berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional dengan memastikan ketersediaan vaksin, mempercepat program vaksinasi, dan mengurangi dampak pandemi terhadap sistem kesehatan Indonesia.

- Dampak di Provinsi Jawa Barat

Sebagai studi kasus, Provinsi Jawa Barat dipilih untuk menganalisis dampak konkret dari implementasi diplomasi vaksin Tiongkok di Indonesia. Beberapa aspek yang menjadi fokus analisis mencakup efektivitas vaksinasi dalam menurunkan jumlah kasus COVID-19, menurunnya tingkat keparahan pasien yang terinfeksi, penurunan angka kematian, serta peningkatan kapasitas sistem layanan kesehatan daerah dalam merespons pandemi.

Kerangka analisis ini memperlihatkan bagaimana pandemi COVID-19 telah mendorong penguatan diplomasi vaksin Tiongkok sebagai bagian dari strategi diplomasi kesehatan global Indonesia. Kerja sama bilateral ini berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperluas distribusi vaksin dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan diplomasi vaksin. Dampak nyata dari kerja sama ini dapat dilihat dari turunnya angka infeksi, berkurangnya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan intensif, serta meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan layanan kesehatan publik di daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana diplomasi vaksin Tiongkok berkontribusi dalam membantu Indonesia, khususnya Jawa Barat dalam menangani pandemi COVID-19 dan memperkuat sistem kesehatan di tingkat provinsi.